

## KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Oleh : *Joko Wicoyo* <sup>1)</sup>

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah yang berkaitan dengan kualitas manusia Indonesia banyak dibicarakan. Masalah ini mulai terangkat menjadi perhatian masyarakat luas semenjak Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial HIPIS 1984 di Palembang dengan tema "Kualitas Manusia dalam Pembangunan". Sejak saat itu pemikiran dan upaya untuk mengembangkan konsep kualitas manusia mulai bergulir. Diskusi di berbagai forum serta penelitian antar disiplin makin sering dilakukan guna mengenali peranan dan masalah kualitas manusia.

Upaya tahap awal ini tercermin agak lengkap pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1986 di Ujung Pandang yang mencakup hasil pengkajian selama dua tahun tentang berbagai segi kualitas manusia dan masyarakat antara lain dilaporkan penelitian mengenai segi-segi kualitas kepribadian seperti kemandirian Nasrun dkk. dan ketahanan mental oleh Darmanto Jatman, dkk.; segi kualitas spiritual oleh Dawam Rahardjo, kualitas kekaryaan oleh Djamaluddin Ancok. Pengembangan kualitas masyarakat disajikan pula, antara lain tentang keserasian sosial, baik dari segi konseptual (Alwi Dahlan dan Kismadi), maupun studi kasus dipermukiman perkotaan (Usman Pelly), kota pelabuhan (Sutandyo Wignyosubroto), dan kota pedalaman (Kusnaka Adimihardja). Di samping itu dilaporkan pula upaya pengembangan metodologi dan tolok ukur, misalnya : metode penelitian kualitas pribadi oleh Bernadette Setiadi, analisis dampak sosial oleh Riga Adiwoso Suprpto dan indeks kualitas hidup oleh Hananto Sidit (Alwi Dahlan, 1992: 5).

Empat tahun berikutnya, dalam pidato pembukaan Kongres IV Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial yang diselenggarakan oleh Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial di Yogyakarta, 16–21 Juli 1990, masalah kualitas manusia dan masyarakat

---

<sup>1)</sup> Alumnus Fakultas Filsafat tahun 1986 dan S2 UGM Program Studi Ilmu Politik Tahun 1991, Staff Pengajar pada ASMI Santa Maria Yogyakarta.

Indonesia diungkap lagi oleh Presiden Soeharto. Dalam pidato tersebut Presiden Soeharto menyampaikan berbagai pertanyaan tentang kualitas manusia Indonesia antara lain: kualitas manusia Indonesia seperti apa yang perlu diciptakan, segi-segi kualitas mana yang hendaknya dijadikan prioritas, apa yang perlu diperhatikan dalam mengembangkannya, pilihan kebijaksanaan mana yang tersedia dan bagaimana kemungkinan dampaknya, baik yang positif maupun yang negatif, bagaimana strategi membangunnya dan bagaimana pula cara menilai keberhasilannya, serta apa tolok ukurnya.

Segala pertanyaan yang menyangkut kualitas manusia Indonesia tersebut tidak mudah dijawab. Persoalannya berakar pada konsep kualitas itu sendiri yang sering dipandang sebagai sesuatu yang normatif dan sukar ditelaah secara objektif.

Berbicara mengenai soal kualitas manusia memang sangat kompleks dan tidak terbatas pada ciri individual manusia saja, melainkan harus dilihat dalam kaitannya dengan konteks yang lebih luas termasuk keadaan dan kualitas dari pranata sosial budaya serta kepemimpinan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan sistem pengembangannya, mekanisme pengelolaan keserasian sosial serta segenap perubahan sosial serta berbagai dampaknya. Jika semenjak GBHN yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selalu mencantumkan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia sebagai hakekat pembangunan nasional, namun hal tersebut tidak selalu dilanjutkan dengan butir-butir arahan untuk penjabaran yang lebih operasional. Padahal kualitas dalam hal ini menyangkut dimensi manusia yang lebih luas, yaitu keluarga, masyarakat dan bangsa. Apalagi dewasa ini masih ada yang melihat kualitas manusia dalam arti sempit, yaitu hanya sebagai sumber daya. Dalam pandangan ini manusia hanya dilihat sebagai penunjang atau salah satu faktor pembangunan. Karena itu kualitas yang hendak diciptakan hanya terarah kepada produktivitas. Namun apabila kita melihat rumusan GBHN 1988 yang merangkum kondisi dan prasyarat yang terkait dengan sasaran kualitas manusia dalam pembangunan Nasional Tahap kedua, jelas tersimpul bahwa yang dimaksudkan adalah konsep kualitas

manusia yang menyeluruh, mencakup aspek kualitas fisik dan kualitas non-fisik sebagai langkah menuju "manusia Indonesia seutuhnya". Prasyarat tersebut termasuk penciptaan kualitas masyarakat yang meningkat menuju perwujudan masyarakat Pancasila.

Untuk dapat menggambarkan segala ciri kualitas manusia yang fisik dan non fisik serta kuantitatif dan kualitatif, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilik manusia sebagai kerangka pikir. Uraian berikut ini mencoba melihat kualitas manusia dari perspektif filsafat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat.

## **GAMBARAN HAKEKAT DAN KUALITAS MANUSIA**

Siapakah manusia itu dan apakah makna hidupnya, merupakan pertanyaan yang selalu muncul dalam setiap periode sejarah, terutama pada saat bangsa manusia berada dalam suatu masa transisi atau kritis (M. Sastrapratedja, 1992: 59).

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin terspesialisasi di satu pihak telah menambah pengetahuan mengenai manusia menjadi tidak terbatas, dan di lain pihak hal ini menambah semakin tidak menentukannya pengertian mengenai manusia, lebih-lebih mengenai apa yang terdalam dari manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi "problematis" bagi dirinya. Dalam situasi yang demikian terasa adanya kebutuhan akan suatu refleksi mengenai manusia secara kritis dan terpadu. C. Geertz pernah mengingatkan bahwa manusia harus didefinisikan tidak hanya dari kemampuan-kemampuan kodratnya saja, seperti misalnya filsafat Pencerahan, dan tidak pula hanya dari perilaku aktualnya saja, seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial masa kini, tetapi dari kaitan keduanya. Dengan kata lain, manusia atau martabat manusia hendaknya tidak hanya dipandang dari segi filsafat metafisik yang jauh dari kenyataan, dan tidak pula hanya dilihat dari ilmu-ilmu sosial-empiris yang dapat mengarah kepada paham determinisme, entah kultural, sosial, maupun psikologis, melainkan manusia hendaknya didekati secara terpadu. Dalam hal ini dialog antara filsafat dan ilmu-ilmu sosial sangat penting. (M. Sastrapratedja, 1992: 60-61).

Menurut M. Sastrapratedja, rumusan mengenai martabat manusia berkembang dari satu periode sejarah ke periode sejarah berikutnya, dengan tekanan pada segi-segi tertentu selaras dengan problem yang dihadapi. Ada beberapa hal yang pada umumnya dikemukakan oleh filsafat kontemporer mengenai martabat manusia yang pada dasarnya membantu untuk memperoleh orientasi perumusan kualitas manusia yaitu :

Pertama, martabat manusia diletakkan pada kedudukannya sebagai subjek atau pribadi yang mampu menentukan pilihan, tindakannya dan dirinya sendiri, walaupun dalam pengertian ini tidak menutup kenyataan bahwa manusia dapat menjadi objek dan terbuka untuk dimanipulasi.

Kedua, martabat manusia terletak pula dalam sosialitasnya. Sosialitas manusia dewasa ini semakin luas radiusnya. Secara spasial semakin bersifat mondial, mengatasi batasan-batasan geografis. Secara temporal kesadaran sosial mengatasi batasan masa kini, dan tentu saja hal ini membawa problem etis baru. Secara kualitatif kesadaran sosial masa kini telah berubah. Prinsip etis yang telah lama dikenal, yaitu bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, tidak hanya berlaku antar individu atau antar kelompok, tetapi berlaku pula antar bangsa dan negara.

Ketiga, martabat manusia dipandang secara totalitas, martabat manusia adalah keutuhannya. Kalau antropologi filsafat lama lebih menekankan satu unsur dari martabat manusia, seperti misalnya kemampuan rasionalnya atau kehendaknya, sekarang unsur-unsur lain dipandang essential dan mempunyai peranan yang tidak kurang penting daripada rasio.

Oleh karena itu, sulitlah untuk memilah-milah kebutuhan dan kualitas manusia ke dalam kategori-kategori spiritual-non-spiritual, fisik-nonfisik, karena keduanya saling berkaitan dan saling memuat.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengembangan, pengukuran dan pemantauan mengenai kualitas manusia haruslah dilakukan secara hati-hati dengan metode yang teruji. Keadaan kualitas manusia Indonesia, misalnya, tidak dapat lagi di-

simpulkan dari pengamatan normatif belaka. Hal ini menjadi semakin penting karena kualitas akan menjadi tolok ukur bagi pembangunan dalam Tahap Jangka Panjang 25 tahun Kedua. Pengembangan tolok ukur dan cara pengukuran kualitas menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah pokok adalah sifat dari kualitas manusia itu sendiri. Kualitas manusia adalah ciri pribadi seseorang yang dapat diibaratkan sebagai "kotak hitam" yang tidak diketahui isinya dari luar. Ia dapat terwujud dalam perbuatan, penampilan atau manifestasi lain, tetapi manifestasi itu pun belum tentu merupakan hasil dari kualitas. Dengan begitu, apa yang terlihat sebagai "kualitas" oleh masyarakat biasanya adalah masukan, keluaran (output), atau lingkungan dari kotak hitam tersebut yang dapat dipantau. Sebagai contoh: tingkat pendidikan, kekayaan, kedudukan, keturunan atau keadaan keluarga, penampilan atau cara berpakaian, maupun gelar yang diperoleh biasa dipakai sebagai ukuran kualitas. Padahal penampakan tersebut dapat berbeda jauh dari tingkat kualitas yang sesungguhnya. Ini menunjukkan juga mengapa upaya memperbaiki kualitas sering tidak berhasil, karena biasanya pengembangan ataupun perbaikan kualitas dilakukan dengan memperbaiki input, output dan lingkungan. Padahal kualitas yang bersangkutan sebetulnya tidak diketahui dan hanya diperkirakan saja. Akibatnya segala upaya untuk memperbaiki kualitas tidak berhasil mencapai sasaran.

## **SOSOK MASYARAKAT INDONESIA**

Persoalan pokok yang perlu dijawab berkenaan dengan gambaran hakekat dan kualitas manusia adalah penjabaran konsep kualitas masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Berdasarkan pada gambaran hakekat dan kualitas manusia tersebut mau tidak mau penjabaran konsep kualitas masyarakat Indonesia akan direfleksikan pada perpaduan dari dua unsur, yaitu sosok normatif masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988. Di dalamnya digariskan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam sua-

sana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras. Hal itu dikaitkan dengan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan sosok kontekstual yang mencerminkan respons masyarakat terhadap situasi objektif yang akan terjadi dalam kurun waktu 25 tahun tahapan pembangunan jangka panjang kedua nanti.

Berdasarkan citra masyarakat normatif sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang akan diwujudkan tidak mendasarkan diri pada premis-premis yang bersumber pada paradigma konflik (Moeljarto Tjokrowinoto, 1992 : 408). Masyarakat yang akan diwujudkan mencerminkan masyarakat yang serba berkesinambungan dan serta berkeselarasan, masyarakat yang berada dalam situasi ekuilibrium yang dinamis. Di dalam situasi tempat berbagai dimensi kehidupan akan makin kompleks, serta makin beragamnya kepentinganyang harus dipenuhi dan makin mendorong terjadinya proliferasi kelembagaan, diferensiasi struktural, dan diferensiasi fungsional. Di samping itu meningkatnya jumlah penduduk akan makin memperbesar kemungkinan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan peluang-peluang dan sumber-sumber yang terbatas. Dalam situasi yang seperti ini masyarakat yang akan diwujudkan masih diharapkan mempunyai mekanisme untuk mempertahankan ekuilibrium yang dinamis. Hal ini hanya mungkin kalau di dalam masyarakat tersebut terdapat domain (ranah) konsensus tentang inti budaya (culture core) yang cukup luas, aturan permainan yang berakar kuat yang mengatur interaksi antar anggota-anggota masyarakat yang disepakati bersama, solidaritas nasional yang dapat mengatasi eksklusivisme dan parokhialisme yang sempit. Kualitas manusia yang dapat menciptakan manusia-manusia yang berwawasan luas penuh toleransi, sehingga kesenjangan sosial tidak akan semakin menyempit.

Di samping itu, kualitas masyarakat yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun tahap kedua tidak dapat dilepaskan dari tuntutan tahapan pembangunan dalam kurun waktu tersebut, yaitu tahap tinggal landas. Hal ini berarti kualitas masyarakat harus mencakup kemampuan untuk mempertahankan momentum pembangunan dengan bertumpu pada kekuatan sendiri, khususnya pada kreativitas, komitmen, dan keterampilan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu pembangunan masyarakat harus diinterpretasikan sebagai proses membentuk masyarakat yang memberi kemampuan" kepada para warganya untuk mengaktualisasikan potensi, prakarsa dan kreativitasnya, maupun menumbuhkan keefektifan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama sekali mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakat dan membatasi hubungan dependensi terhadap elite dan birokrasi. Pembangunan masyarakat yang demikian hanya akan terwujud melalui strategi mawas ke dalam, dan tidak menyerahkan pembentukan kualitas dan sosok masyarakat Indonesia pada kekuatan dari luar. Dewasa dan tidaknya seseorang atau bangsa dapat diukur lewat pertanyaan : "Sampai di mana ia sudah mampu melewati ambang dan mengolah fase pencerahan diri (Aufklarung)?" Pencerahan adalah proses penemuan diri lewat perantaraan terus menerus, sehingga memungkinkan orang atau bangsa menghayati diri dan sesamanya sebagai manusia atau bangsa yang punya harga diri pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, kedewasaan suatu bangsa tercipta sebagai akumulasi kedewasaan warganya. Manusia "Aufklarung" memang bukan milik bangsa Barat abad XVIII, tetapi secara universal harus dicapai oleh setiap bangsa dan setiap warga manusia. Pencerahan adalah unsur esensial dalam proses pendewasaan. Pencapaian pendewasaan lewat fase pencerahan dapat diukur dari kemampuan menemukan sintese dalam bentuk dialektika antara hal-hal yang universal dan yang kontekstual.

## PENUTUP

Kualitas manusia tidak mungkin ditinjau tersendiri, sebab bersama kualitas lingkungan akhirnya menciptakan apa yang disebut dengan kualitas hidup. Kualitas manusia bersifat relatif terhadap kondisi lingkungan total yang mengelilinginya. Kualitas manusia juga baru mendapat makna sesungguhnya bila dipandang dalam konteks interaksi antara manusia dengan lingkungan total tersebut.

Pembinaan manusia beserta lingkungannya dapat dituangkan ke dalam sebuah sistem model agar diperoleh suatu alur pikir yang berguna untuk menentukan strategi, perencanaan dan pengendalian pembinaan tersebut.

Oleh karena itu pembinaan sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan bagian dari sistem pembangunan, maka diantisipasi adanya beberapa prasyarat kondisional agar arah pembinaan mengenai sasarannya, yaitu peningkatan kualitas manusia. Untuk itu dibutuhkan kondisi-kondisi masyarakat yang dinamis, berwawasan luas, penuh toleransi dan dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Dahlan, M., "Menjabarkan Kualitas dan Martabat Manusia dan Masyarakat" dalam *Membangun Martabat Manusia : Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Sofjan Effendi, Sjafrin Sairin, M. Alwi Dahlan (Penyunting), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Oetama, Jakob, *Menuju Masyarakat Baru Indonesia : Antisipasi terhadap Tantangan Abad XXI*, Diangkat dari Sarasehan HUT XXV Kompas, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Sastrapratedja, M., "Konsep Kualitas dan Martabat Manusia : Konsep Budayawan dan Masyarakat" dalam

*Membangun Martabat Manusia : Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Sofjan Effendi, Sjafri Sairin, M. Alwi Dahlan (Penyunting), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

Tjokrowinoto, Moeljarto, "Birokrasi Pembangunan Masyarakat" dalam *Membangun Martabat Manusia : Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Sofjan Effendi, Sjafri Sairin, M. Alwi Dahlan (Penyunting), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.